

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Bertujuan untuk mengingkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah merupakan daerah bagian intergral dari pembangunan nasional, dan berlangsung secara berkesinambungan. Salah satu bidang yang paling penting adalah pembangunan bidang ekonomi. Dalam prosesnya pembangunan senantiasa berupaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, yang sekaligus di harapkan bisa mengubah struktur perekonomian daerah yang terns berkembang, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan pendapatan masyarakat yang lebih merata, Pertumbuhan ekonomi dalam sebuah Negara dipengaruhi oleh akumulasi modal antara lain seperti investasi oada tanah, peralatan, prasarana dan sarana dan paling penting adalah sumber daya manusia), sumber daya alam , sumber daya manusia (human resources) baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi (Afdal 2018).

Kehidupan perekonomian yang semakin banyak tantangan dan tuntutan global membuat kebanyakan rumah tangga di Indonesia membutuhkan usaha kecil untuk menambah penghasilan keluarga, dimana hanya mengandalkan gaji atau penghasilan bulanan kepala keluarga. Istri dan ibu dalam rumah tangga harus mengelola penghasilan keluarga yang kadang sudah tidak mencukupi lagi terhadap kebutuhan keluarga di masa sekarang ini. Untuk mengukur maju tidaknya perekonomian daerah sebagai hasil dari program pembangunan daerah diperlukan alat pengukur yang tepat yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik

Regional Bruto adalah jumlah barang yang dihasilkan suatu wilayah atau daerah selama satu periode dimana jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dinilai dengan uang atas dasar harga pasar yang sedang berjalan (Tarigan Robinson, 2010).

Perkembangan ekonomi daerah yang baik akan meningkatkan investasi dan juga akan meningkatkan daya beli masyarakat serta memberikan dampak positif pada pertumbuhan pendapatan nasional. Selanjutnya adanya kenaikan investasi dan konsumsi menyebabkan kecenderungan terjadinya inflasi, dengan demikian maka perlu diatasi melalui penerapan strategi kebijakan ekonomi yang terpadu baik secara makro dan sektoral namun diharapkan tetap mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Pendekatan fungsi produk untuk menganalisis output secara agregat dapat menggunakan konsep fungsi produksi dari teori ekonomi perusahaan/mikro. Di dalam fungsi produksi disebutkan bahwa output merupakan fungsi dari faktor produksi tanah, tenaga kerja, modal dan tingkat teknologi (faktor efisien). Sedangkan fungsi produksi agregat menunjukkan hubungan fungsional antara output agregat atau disebut juga dengan produk domestik bruto dengan stok input. Jika faktor produksi tanah merupakan bagian dari faktor produksi, modal dan teknologi dianggap konstan, maka hanya ada dua jenis faktor produksi yaitu modal dan tenaga kerja (Panelewen, Kalangi, and Walewangko 2020).

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara disebut sebagai ukuran tingkat keberhasilan kinerja pemerintah, lembaga, dan instansi terkait, oleh karena itu setiap negara akan berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Untuk mencapai tingkat keberhasilan kinerja tersebut, pemerintah memiliki tiga peran

penting yang terdiri dari peranan alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya dilakukan melalui berbagai kebijakan baik dalam bentuk kebijakan fiskal maupun moneter. Salah satu digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Untuk mencapai tingkat keberhasilan kinerja tersebut, pemerintah memiliki tiga peran penting yang terdiri dari peranan alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi indikator untuk yang melihat pertumbuhan ekonomi di suatu negara adalah dengan menggunakan Produk Domestik Bruto produk Domestik Bruto merupakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu satu tahun tertentu (Himannudin et al. 2022).

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses di mana terdapat saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan seksama sehingga diketahui runtutan peristiwa yang timbul yang akan mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ketahap pembangunan berikutnya (Rustiadi et al, 2011, h.43).

Menurut United Nation Development Programme (UNDP) pembangunan manusia adalah suatu proses dalam perluasan pilihan kepada masyarakat melalui berbagai upaya-upaya untuk pemberdayaan yang tujuan utamanya adalah untuk peningkatan kemampuan dasar manusia sepenuhnya agar dapat berpartisipasi disegala bidang pembangunan demi kepentingan masyarakatnya. Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara, sebuah negara yang dikatakan maju bukan hanya dihitung dari pendapatan domestic brutonya saja akan tetapi juga mencakup aspek

harapan hidup serta pendidikan dan kesehatan masyarakatnya juga dihitung (Widodo dkk, 2011, h.54)

Tabel 1.1
Produk Domestik Bruto Di Indonesia Tahun 1992-2022 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Produk Domestik Bruto Di Indonesia Tahun 2010-2022 (Jutaan Rupiah)
1992	7.762.200
1993	8.988.500
1994	9.699.601
1995	10.268.201
1996	12.481.601
1997	14.210.401
1998	16.718.401
1999	19.559.700
2000	22.745.000
2001	25.988.401
2002	30.201.701
2003	1.089.300
2004	8.006.001
2005	5.406.601
2006	10.631.200
2007	7.824.300
2008	1.684.701
2009	2.610.015
2011	377.230,60
2012	16.454.801,90
2013	460.657,88
2014	14.371.652,09

2015	5.234.525,49
2016	5.390.010,67
2017	5.931.289,26
2018	6.806.709,35
2019	6.864.420,63
2020	6.453.512,66
2021	7.266.624,03
2022	8.849.664,54

Sumber : Badan Pusat Stcistik Indonesia 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa PDB setiap tahunnya mengalami perubahan diantaranya pada tahun 2010 Pdb di Indonesia yaitu Rp2.610.014,65 disebabkan karena dampak krisis global antara China dan Amerika Serikat pulih , kemudian pada tahun 2012 sebesar Rp16.454.801,9 disebabkan pertumbuhan di lapangan usaha informasi dan komunikasi serta dicapainya komponen pengeluaran komponen konsumsi Lembaga Non-profit Rumah Tangga (LNPRT),kemudian pada tahun 2014 sampai dengan 2022 pdb di Indonesia mengalami kenaikan walaupun meningkatnya tidak terlalu tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp8.849.664,54 hal tersebut penyebabnya diakibatkan kenaikan di jasa keuangan dan asuransi, informasi, komunikasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya, kemudian kenaikan pada jasa-jasa pada tahun sebelumnya dan kenaikan pada sektor yang lainnya yaitu usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor (Didu and Islamiah 2017).

Jumlah angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Semakin pesatnya pertumbuhan angkatan kerja tanpa diiringi pertumbuhan lapangan kerja baru akan mengakibatkan akumulasi kuantitas

penganggur di Indonesia bertambah tiap tahunnya. angkatan ke a memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengangguran di Indonesia pengangguran di pasar tenaga kerja dianggap sebagai fenomena struktural dimana ditemukan adanya indikasi persenjangan antara total lowongan keadaan dengan pencari kerja atau angkatan ke a yang ingin bekerja. Faktor geografis, sejarah, serta diskriminasi berdasarkan suku, jenis kelamin, dan numerus merupakan spek yang diketahui sebagai pemicu gejala struktural ini. Teori Keynes ini selaras dengan kondisi nyata yang dialami Indonesia dimana faktor pemicu eskalasi pengangguran adalah persebaran kesempatan kerja yang tidak merata dimana peluang kerja di wilayah perkotaan lebih banyak daripada perdesaan. Hal ini membuat banyak masyarakat pindah ke kota untuk mencari pekerjaan dan membuat tingginya jumlah pengangguran di wilayah perkotaan. (Mutia, Indrawati, and Sarfiah 2019).

Jumlah tenaga kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah tenaga produktif. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga ke a diharapkan akan meningkatnya produksi yang berarti akan meningkatkan pula PDB. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses pembangunan di suatu wilayah. Semakin besar jumlah tenaga kerja, lebih-lebih apabila disertai dengan keahlian yang cukup memadai, akan semakin pesat pula perkembangan pembangunan di wilayah tersebut. Masalah pertumbuhan bukan lagi merupakan hal yang mendasar tetapi yang lebih penting adalah memikirkan bagaimana PDB bisa menciptakan lapangan kerja. Dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, ketenagakerjaan merupakan masalah yang rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan

rendah (Sayifullah and Emmalian 2018).

Tabel 1.2
Angkatan Kerja Di Indonesia Tahun 1992-2022 (Milyaran Jiwa)

Tahun	Penduduk Berumur 15 Tahun
	Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan
1992	65.384.391
1993	67.578.960
1994	69.518.618
1995	70.426.724
1996	73.104.538
1997	73.911.624
1998	75.891.561
1999	76.718.265
2000	79.687.230
2001	83.552.361
2002	85.047.007
2003	87.292.541
2004	88.816.859
2005	89.837.730
2006	90.807.417
2007	91.647.166
2008	92.810.791
2009	93.722.036
2010	24.715.256
2011	24.879.572
2012	25.300.473,94
2013	24.662.314
2014	26.227.052,32
2015	26.713.721

2016	27.172.889,16
2017	27.562.213
2018	128.838.806,30
2019	28.840.036
2020	29.240.158,38
2021	29.673.049
2022	30.044.797,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat angkatan kerja pada tahun 2010 Rp 24.715.255,54 ribu jiwa, sedangkan dari pada tahun 2018 angkatan kerja semakin meningkat sangat tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 128.889,16 ribu jiwa dengan bertambahnya angkatan kerja maka akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia dan akan menambah lapangan kerja, kemudian pada tahun 2022 angkatan kerja meningkat tetapi tidak setinggi seperti pada tahun 2018, pada tahun 2022 ini angkatan kerja bertambah Rp 30.044.797,25 ribu jiwa, dengan bertambahnya angkatan kerja maka akan dapat mencegah pengangguran di Indonesia dan akan mengurangi harapan hidup setiap tahunnya.

Angka Harapan hidup saat Lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan yang semakin tinggi menunjukkan semakin tingginya kualitas hidup manusia. Kualitas hidup manusia berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja (Rusli and Sihaloho 2024).

Badan Pusat Statistik mendefinisikan angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada

suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik tahun 1992-2022 Angka Harapan Hidup per Kabupaten/ Kota di Provinsi Indonesia memiliki angka yang berbeda-beda, dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1.3
Angkatan Harapan Hidup Di Indonesia Tahun 1992-2022**

Angka harapan Hidup(%)	
	35,96%
	38,71%
1994	40,62%
	47,36%
	47,30%
	34,70%
	36,31%
	33,21%
2000	64,62%
	63,40%
2002	65,69%
2003	64,67%
2004	64,34%
2005	49,13%
	49,56%
2007	49,10%
2008	49,30%
2009	49,21%
	69,89%
	70,05%

	70,25%
	70,45%
	70,73%
	70,85%
2016	70,94%
2017	71,11%
	71,24%
	71,38%
	71,52%
2021	71,61%
2022	71,88%

Sumber : IPM Provinsi aceh 1992-2022 (BPS 2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa data angka harapan hidup setiap tahunnya mengalami kenaikan diantaranya dari tahun 2010 sampai 2022 angka harapan hidup mengalami peningkatan yaitu sampai 71,88 hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatnya harapan hidup maka akan mencegah faktor kematian di Indonesia dan akan meningkatnya pendidikan dan pendapatan di Indonesia sehingga akan berpengaruh pada pengeluaran yang meningkat.

Pengeluaran pemerintah di anggap juga sangat penting dalam mempengaruhi kemiskinan terutama pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, karena pengeluaran pemerintah merupakan salah satu indikator atau aspek penggunaan sumber daya ekonomi melalui pembayaran pajak, dan juga pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bisa dikatakan sebuah-komposisi yang diperlukan dalam Indeks Pembangunan Manusia.(C. P. M. Sari and Nurdin 2018).

Tabel 1.4
Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia Tahun 1992-2022 (Milyaran Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah Indonesia (Ribu Rupiah)
1992	636.983.216
1993	1.992.124.905
1994	629.779.212
1995	2.013.471.282
1996	773.183.898
1997	1.724.919.335
1998	763.494.145
1999	1854582478r
2000	960.819.539
2001	1.197 123.123
2002	934.857.722
2003	1.331.110.913
2004	934.857.722
2005	946.706.398
2006	970.105.260
2007	982.597.904
2008	964.090.898
2009	932.449.904
2010	20.877.247.720
2011	25.299.421.562
2012	31.514.773.329
2013	34.992.260.423
2014	39.222.778.339
2015	38.103.194.459
2016	40.644.869.953

2017	48.092.130.083
2018	50.839.354.227
2019	53.044.993.216
2020	48.103.138.169
2021	48.103.138.169
2022	37.725.029.180

Sumber : Badan PuSat Statistik Indonesia 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah dari tahun 2010 sampai 2022 mengami peningkatan yaitu pada tahun 2010 pengeluaran pemerintah Rp20.877.247.720 sampai pada tahun 2022 pengeluaran pemerintah meningkat yaitu Rp37.725.029.180 hal tersebut dapat disimpulkan penyebab meningkatnya pengeluaran pemerintah yaitu tingginya pembelanjan di indosia, faktor meningkatnya pengeluaran pemerintah yaitu meningkatnya kebutuhan pemerintah dari masyarakat penerima layanan, kemudian meninakain; a pengediaan layanan dan meningkatnya ketidakefesiensi pemberian layanan(Sirait, Ferayanti, and Qudraty 2022).

1.2. Perumusan Penelitian

1. Bagaimanakah pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB di Indonesia?
2. Bagaimanakah angka harapan hidup berpengaruh terhadap PDB di Indonesia?
3. Bagaimanakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PDB di Indonesia?
4. Bagaimanakah pengaruh tenaga kerja angka harapan hidup dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PDB di Indonesia.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tenaga kerja terhadap PDB di Indonesia.
2. Untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh pangka harapan hidup terhadap PDB di Indonesia.
3. Untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDB di Indonesia.
4. Untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh tenaga kerja angka harapan hidup dan pengeluaran pemerintah terhadap PDB di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini banyak sekali harapan manfaat yang ingin penulis dapatkan terutama dari sudut ilmu pengetahuan mengenai pengaruh hubungan yang ditimbulkan dari angkatan kerja angka harapan hidup dan pengeluaran pemerintah terhadap PDB di Indonesia. Manfaat lainnya yang ingin penulis peroleh adalah kesempatan untuk membahas segala teori yang didapat selama perkuliahan.

1.4.1. Manfaat Teori

Manfaat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan khususnya linguistik atau linguistik disebut manfaat teori. Dalam kaitan ini, khususnya sebagai informasi tambahan bagi pembaca dan peneliti, khususnya mengenai implikasi dan kesimpulan dalam percakapan buku.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang inferensi dan memperkaya ilmu pragmatik, khususnya implikatur dan inferensi, pengetahuan peneliti lain.